

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG PERDAGANGAN: STUDI KOMPARASI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP

Kayzada Areta Batara¹, Laode Muhammad Fathun²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Abstract

This study investigates the paradigmatic shift in United States trade policy between the administrations of Barack Obama and Donald Trump. Moving beyond a simple chronological account, the research employs a comparative analysis and literature review to dissect the drivers behind the transition from Obama’s multilateral engagement to Trump’s unilateral protectionism. The findings reveal that this policy metamorphosis was not merely a change in rhetoric but a strategic pivot driven by complex domestic and external pressures. Domestically, the policies were fueled by rising political populism and deepening economic inequality, which eroded support for free trade. Externally, the rapid ascent of China as a global economic hegemon forced a re-evaluation of the US strategy, transforming trade relations from mutual interdependence into a sphere of intense strategic contestation. The analysis demonstrates that under the Trump administration, the US increasingly prioritized national interest and geopolitical supremacy over the principles of global economic efficiency and liberalization. This shift significantly contributed to the weakening of the multilateral trading system, characterized by the withdrawal from key agreements and the escalation of tariff wars. Consequently, the study concludes that the divergence in trade policies between these two eras marked a critical turning point in international relations. It signaled a move away from the post-Cold War consensus of open markets toward a new era defined by economic nationalism, structural tensions, and a zero-sum approach to global commerce. These changes have fundamentally altered the dynamics of the global economy, challenging the stability of the existing international order.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pergeseran paradigmatik dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat antara masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump. Melalui analisis komparatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengurai faktor pendorong transisi dari pendekatan multilateral Obama menuju proteksionisme unilateral Trump. Temuan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tersebut bukan sekadar pergantian retorika, melainkan pivot strategis yang didorong oleh tekanan domestik berupa populisme politik dan ketimpangan ekonomi, serta tekanan eksternal berupa kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat semakin memprioritaskan kepentingan nasional dan supremasi geopolitik di atas prinsip efisiensi dan liberalisasi ekonomi global. Pergeseran ini berkontribusi pada pelemahan sistem perdagangan multilateral, yang ditandai dengan penarikan diri dari sejumlah perjanjian penting dan eskalasi perang tarif. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan kebijakan perdagangan antara kedua era menandai titik balik penting dalam hubungan internasional, yaitu pergeseran dari konsensus pasar terbuka pasca-Perang Dingin menuju era nasionalisme ekonomi, ketegangan struktural, dan pendekatan zero-sum dalam perdagangan global.

Kata Kunci

Barack Obama; Donald Trump; geopolitik; kebijakan perdagangan; proteksionisme

PENDAHULUAN

Liberalisasi perdagangan adalah salah satu dari beberapa pilar utama dalam sistem ekonomi global. Liberalisasi perdagangan sendiri lebih menekankan pengurangan hambatan pada perdagangan internasional, seperti tarif, regulasi non-tarif, dan kuota, yang berguna untuk menciptakan arus barang dan jasa yang lebih bebas antarnegara. Jika dilihat dalam konteks ekonomi internasional, liberalisasi perdagangan bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan

sistem ekonomi global seperti terbentuknya pasar bebas yang kompetitif dan terbuka bagi semua negara. Prinsip dasar dari liberalisasi mengungkapkan bahwa tiap-tiap aktor ekonomi berperan tanpa adanya proteksi berlebihan terhadap sektor domestiknya, sehingga terwujud suatu mekanisme perdagangan yang adil, seimbang, dan berfokus pada efisiensi global. Melalui adanya kerangka teori berupa keunggulan komparatif, liberalisasi dalam perdagangan memungkinkan tiap-tiap negara untuk lebih fokus terhadap produksi dari komoditas yang memiliki suatu keunggulan yang relatif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dunia. Berkaitan dengan hal ini, laporan dari International Monetary Fund (IMF) mengungkapkan bahwa liberalisasi perdagangan memiliki kontribusi terhadap penurunan biaya input produksi, peningkatan variasi produk yang memiliki harga yang lebih kompetitif, serta ekspansi peluang ekspor bagi negara maju maupun negara berkembang. Keterbukaan dalam perdagangan mampu mendorong adanya aliran teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, liberalisasi perdagangan bukan hanya dipandang sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi geopolitik yang menentukan posisi suatu negara dalam tatanan ekonomi internasional yang berlandaskan keterbukaan dan keseimbangan.

Pada awalnya, liberalisasi perdagangan memang dirancang untuk menciptakan pasar bebas yang berimbang dan saling menguntungkan. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai dengan asumsi tersebut. Berdasarkan fakta di lapangan, liberalisasi perdagangan yang diaplikasikan terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat berubah menjadi kontestasi. Kontestasi adalah bentuk persaingan strategis antarnegara, di mana kontestasi tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga pada teknologi, supremasi pasar global dan pengaruh politik. Persaingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok merefleksikan perubahan hubungan ekonomi yang pada awalnya saling bergantung menjadi persaingan ekonomi yang kompleks, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok masing-masing saling memberlakukan kebijakan proteksionis baru seperti pembatasan investasi lintas sektor strategis dan pemberlakuan kebijakan tarif impor yang tinggi. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa liberalisasi perdagangan dapat berbalik arah menjadi persaingan saat strategi geopolitik dan kepentingan nasional lebih diutamakan daripada prinsip keterbukaan ekonomi global. Akibatnya, sistem perdagangan internasional yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis justru berbalik dan mengakibatkan ketegangan struktural yang berimplikasi pada perubahan pandangan kebijakan luar negeri, termasuk dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama dan Donald Trump.

Pergeseran hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dari yang pada awalnya adalah liberalisasi menuju kontestasi merupakan persoalan penting yang memiliki

implikasi luas bagi perekonomian global. Dalam ekonomi, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 sebesar 3,2%, namun kebijakan tarif dan hambatan perdagangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok berpotensi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi global secara signifikan. Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki kekuatan besar, sehingga konflik yang terjadi di antara mereka tidak hanya berimbas pada neraca perdagangan, melainkan juga pada stabilitas ekonomi global. Dalam hal sosial, Pew Research Center menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Amerika Serikat menilai bahwa sentimen anti-Asia yang muncul sebagai dampak dari ketegangan ini bersifat negatif bagi kondisi sosial negara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konflik ekonomi dapat berkonsekuensi pada ketegangan sosial dan opini publik yang dapat membawa risiko perubahan radikal dalam tatanan sosial. Dalam politik dan geopolitik, persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok lebih dari sekadar isu tarif dan perdagangan. Persaingan tersebut menjadi sebuah tantangan yang dapat melemahkan kepercayaan antarnegara, dan meningkatkan rivalitas strategis yang dapat memicu konflik struktural yang lebih luas. Maka transformasi hubungan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, melainkan turut memberi tekanan yang signifikan pada struktur sosial dan politik internasional yang selama ini bergantung pada rasa saling percaya antarnegara, keterbukaan dan integrasi. Implikasi dari perubahan kebijakan ini perlu diberi perhatian serius tidak hanya oleh para pembuat kebijakan ekonomi, melainkan juga oleh para pemimpin dunia guna menjaga stabilitas dan kerja sama global.

Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam isu ekonomi global dan perdagangan internasional, terdapat perbedaan yang jelas jika masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump dibandingkan. Pada masa Barack Obama, yaitu pada tahun 2009–2017, kebijakan luar negeri Amerika Serikat lebih didasarkan pada kerja sama multilateral dan keterlibatan (*multilateral cooperation and engagement*). Pemerintahan Obama berusaha untuk lebih memperkuat sistem perdagangan global berbasis aturan lewat institusi internasional, yaitu World Trade Organization (WTO), juga perjanjian regional seperti Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP dibuat untuk tujuan menetapkan standar perdagangan yang adil dan transparan serta memperluas akses pasar di kawasan Asia-Pasifik. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai strategi diplomasi ekonomi yang lebih menekankan penyelesaian sengketa melalui dialog internasional dan mekanisme institusional. Menurut data yang ada dari United States Trade Representative (USTR), pemerintahan Obama dihitung sejak masa awal jabatan telah mengajukan lebih dari dua puluh kasus sengketa dagang kepada WTO, terutama terhadap Tiongkok, dan Obama memenangkan seluruh perkara yang telah diputuskan (USTR, 2015; White House Archives, 2016). Melalui strategi tersebut, dapat dilihat bahwa Barack Obama

lebih memilih untuk melewati forum internasional dan jalur hukum dibandingkan dengan langkah konfrontatif dalam menyikapi ketidakseimbangan perdagangan.

Berbeda dengan pemerintahan Barack Obama, pemerintahan Donald Trump, yaitu pada tahun 2017–2021, mengalami pergeseran mendasar dari paradigma multilateral menjadi strategi kompetitif dan proteksionis yang sangat terlihat. Pendekatan strategi kompetitif dan proteksionis lebih menekankan kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya kebijakan *America First*. Kebijakan tersebut menilai bahwa perdagangan internasional telah merugikan posisi ekonomi domestik Amerika Serikat. Pemerintahan Trump secara aktif menerapkan kebijakan tarif tinggi terhadap produk-produk impor yang berasal dari Tiongkok, Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada. Hal tersebut dilakukan dengan maksud menekan defisit perdagangan dan melindungi industri domestik. Kebijakan seperti itulah yang dapat menjadi penanda transisi dari yang awalnya adalah kebijakan diplomasi ekonomi berbasis aturan menjadi bentuk kompetisi strategis yang sering kali bersamaan dengan *trade war* atau perang dagang, di mana instrumen ekonomi dimainkan sebagai alat politik dan keamanan nasional. Selain mempertegas kecenderungan unilateral Amerika Serikat, pendekatan Trump juga kerap memunculkan ketegangan diplomatik serta fragmentasi dalam sistem perdagangan global yang sebelumnya berlandaskan prinsip liberalisasi dan interdependensi ekonomi.

Dengan demikian, dinamika perubahan kebijakan Amerika Serikat yang pada era Obama adalah liberalisasi perdagangan menjadi lebih protektif, serta kontestasi ekonomi global antara Amerika Serikat dan Tiongkok di era Trump, dapat menjelaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dimensi politik, keamanan, dan ideologi kebijakan luar negeri yang dipedomani oleh setiap pemerintahan. Perbedaan arah kebijakan luar negeri antara Barack Obama yang lebih mengutamakan prinsip kerja sama multilateral dan Donald Trump yang lebih mengutamakan pendekatan kompetitif dan proteksionis menegaskan bahwa ada transformasi yang mendasar dalam strategi Amerika Serikat terhadap sistem perdagangan dunia. Fenomena ini penting untuk dikaji karena berdampak langsung pada stabilitas hubungan diplomatik antarnegara, stabilitas ekonomi global, dan keberlangsungan prinsip liberalisasi perdagangan yang telah lama menjadi fondasi dalam sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam bidang perdagangan pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump untuk memahami bagaimana perbedaan strategi, paradigma, dan pendekatan politik dan ekonomi keduanya membentuk arah hubungan perdagangan internasional dan memengaruhi dinamika tatanan ekonomi global.

KERANGKA ANALISIS

Analisis dalam studi ini berpijak pada kerangka konseptual yang membedakan dua paradigma utama kebijakan perdagangan: pendekatan liberal-kooperatif dan pendekatan kompetitif-proteksionis. Pendekatan liberal-kooperatif, yang menjadi ciri kebijakan era Obama, berlandaskan prinsip liberalisme ekonomi dan multilateralisme. Dalam kerangka ini, perdagangan internasional dipandang sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang bertujuan memperkuat posisi negara melalui integrasi ke dalam sistem berbasis aturan (*rules-based system*), perluasan pasar, dan penegakan standar global mengenai hak buruh, lingkungan, serta transparansi. Amerika Serikat diposisikan sebagai *rule-maker* yang menjaga keterbukaan sistem perdagangan internasional.

Sebaliknya, pendekatan kompetitif-proteksionis yang menandai era Trump berakar pada doktrin “America First” dan nasionalisme ekonomi. Paradigma ini menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi di atas prinsip efisiensi global dan liberalisasi. Perdagangan diperlakukan sebagai arena kompetisi *zero-sum*, di mana instrumen tarif, renegotiasi perjanjian bilateral, dan penarikan diri dari kesepakatan multilateral digunakan sebagai alat politik dan keamanan nasional. Pergeseran dari satu paradigma ke paradigma lainnya tidak hanya mencerminkan perbedaan gaya kepemimpinan, tetapi juga respons terhadap tekanan domestik (*populisme ekonomi*, ketimpangan, dan stagnasi sektor manufaktur) serta dinamika eksternal (*kebangkitan Tiongkok sebagai kompetitor strategis*).

Kerangka komparatif ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap orientasi kebijakan, instrumen yang digunakan, serta dampaknya terhadap sistem perdagangan multilateral dan posisi strategis Amerika Serikat dalam tatanan ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif dan tinjauan pustaka (*literature review*). Data dikumpulkan dari sumber sekunder yang kredibel, meliputi dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat (laporan United States Trade Representative/USTR, arsip White House), publikasi lembaga internasional (IMF, WTO), laporan think tank (Peterson Institute for International Economics), serta artikel jurnal ilmiah dan analisis media terpercaya. Analisis dilakukan dengan membandingkan orientasi, instrumen, dan dampak kebijakan perdagangan pada dua periode pemerintahan (Obama 2009–2017 dan Trump 2017–2021) berdasarkan kerangka konseptual liberal-kooperatif versus kompetitif-proteksionis. Validitas argumentasi diperkuat melalui triangulasi sumber dan penelusuran jejak kebijakan (*policy tracing*) terhadap peristiwa-peristiwa kunci seperti

penandatanganan TPP, penarikan diri dari TPP, renegotiasi NAFTA menjadi USMCA, serta eskalasi perang dagang dengan Tiongkok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengkaji pergeseran orientasi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dari masa Barack Obama ke masa Donald Trump, yang menunjukkan perubahan mendasar dalam cara AS memposisikan dirinya dalam tatanan ekonomi global. Pada era Obama, kebijakan perdagangan berlandaskan pendekatan liberal-kooperatif yang menekankan integrasi ekonomi dan komitmen terhadap multilateralisme. Sebaliknya, pemerintahan Trump menerapkan pendekatan kompetitif-proteksionis melalui agenda “America First” yang menolak perjanjian multilateral dan memprioritaskan perlindungan industri domestik. Perbedaan orientasi tersebut tidak hanya mencerminkan variasi gaya kepemimpinan, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi domestik, dinamika politik, serta meningkatnya kompetisi strategis dengan Tiongkok. Oleh karena itu, pembahasan ini berargumen bahwa perubahan kebijakan perdagangan antara kedua pemerintahan mencerminkan transisi ideologis yang lebih luas dari komitmen terhadap keterbukaan global menuju sikap skeptis terhadap globalisasi yang berdampak signifikan pada posisi strategis Amerika Serikat dan stabilitas sistem perdagangan internasional.

Kebijakan Perdagangan Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Barack Obama

Kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat di era pemerintahan Barack Obama (2009–2017) memposisikan visi “Middle Class Economics” dalam posisi yang strategis, yaitu upaya guna memperkuat ekonomi domestik melalui adanya peningkatan ekspor dan pewujudan lapangan kerja dengan upah yang tinggi. Pemerintahan Obama menekankan bahwa globalisasi mesti dikelola untuk memberikan manfaat yang nyata bagi warga negara Amerika Serikat, tidak hanya untuk korporasi besar. Di dalam kerangka tersebut, perdagangan internasional dipandang sebagai suatu sarana guna meningkatkan daya saing ekonomi domestik sekaligus mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat dalam tatanan ekonomi global.

Orientasi kebijakan ini dikategorikan sebagai liberal-kooperatif, di mana liberalisasi dalam perdagangan dijalankan seiring komitmen terhadap tata kelola global berbasis aturan. Pemerintahan Obama berusaha menguatkan tatanan perdagangan multilateral ataupun regional, serta menjadikan Amerika Serikat sebagai rule-maker daripada rule-taker. Michael Froman, yang menjabat sebagai United States Trade Representative (USTR) pada periode kedua pemerintahan Obama, menegaskan bahwa peraturan perdagangan era ini didesain guna

menetapkan standar global yang tinggi mengenai hak buruh, lingkungan, serta transparansi dalam bidang ekonomi.

Dalam praktiknya, kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Pertama, pemerintah Obama menandatangani dan memperluas sejumlah perjanjian perdagangan bebas, termasuk dengan Korea Selatan, Kolombia, dan Panama, yang secara kolektif membuka akses pasar baru bagi produk AS. Kedua, fokus utama kebijakan ini adalah pembangunan mega-regional agreements seperti Trans-Pacific Partnership (TPP), yang dimaksudkan untuk menetapkan standar ekonomi baru di kawasan Asia-Pasifik serta menandingi pengaruh Tiongkok. USTR melaporkan bahwa perjanjian tersebut akan “menetapkan aturan perdagangan abad ke-21 yang mencerminkan nilai-nilai Amerika” (USTR, 2015).

Selain itu, pemerintahan Obama memfokuskan diri pada penegakan kebijakan perdagangan (trade enforcement). Di dalam siaran pers resminya, USTR mengatakan bahwa periode ini menandai peningkatan paling besar di dalam sejarah kebijakan perdagangan modern Amerika Serikat di dalam hal penegakan hukum terhadap implementasi yang tidak adil oleh mitra dagang (USTR, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat liberal, kebijakan perdagangan Obama masih tetap memiliki elemen proteksi selektif terhadap kepentingan nasionalnya. Pada masa ini, kinerja ekspor Amerika Serikat menunjukkan adanya tren positif. Menurut laporan dari USTR, ekspor barang “Made in America” mencapai rekor tertingginya selama lima tahun berturut-turut dan mendukung adanya 11,7 juta pekerjaan di sektor ekspor (USTR, 2015). Hal ini menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan di bawah pemerintahan Obama bukan semata-mata berorientasi pada pasar global, tetapi juga diarahkan guna menguatkan fondasi ekonomi domestik.

Meskipun demikian, kebijakan perdagangan Obama menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi internal, perbedaan pandangan dalam Partai Demokrat memunculkan dilema antara dukungan terhadap liberalisasi ekonomi dan kebutuhan untuk melindungi pekerja domestik. Dari sisi eksternal, stagnasi Putaran Doha di bawah WTO mendorong AS beralih ke kerja sama regional yang lebih fleksibel, seperti TPP, untuk menjaga momentum kepemimpinan ekonomi global. Secara keseluruhan, kebijakan perdagangan Amerika Serikat pada masa Barack Obama berorientasi pada liberalisasi terkelola, yaitu membuka pasar global secara progresif sambil menegakkan aturan dan memperkuat posisi tawar AS dalam sistem internasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi, standar global, dan tata kelola ekonomi yang transparan, sehingga menandai era yang berbeda dari proteksionisme nasionalis yang muncul di pemerintahan berikutnya.

Kebijakan Perdagangan Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Donald Trump

Kebijakan perdagangan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump (2017–2021) menandai adanya pergeseran yang signifikan. Pergeseran ini berakar pada doktrin “America First” yang menempatkan kepentingan ekonomi domestik sebagai suatu prioritas utama dalam setiap hubungan perdagangan internasional. Pemerintahan Trump menilai bahwa tatanan perdagangan global yang liberal dan multilateral, seperti di bawah World Trade Organization (WTO), telah menyebabkan adanya ketidakseimbangan neraca perdagangan dan melemahkan daya saing industri nasional Amerika Serikat.

Salah satu langkah paling menonjol dari kebijakan ini adalah penarikan Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership (TPP) pada awal 2017. Langkah ini menunjukkan adanya penolakan terhadap kerja sama multilateral yang dinilai mengurangi kedaulatan ekonomi Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Trump mengedepankan perjanjian bilateral yang dianggap lebih menguntungkan secara langsung. Kebijakan ini kemudian diwujudkan melalui adanya renegotiasi North American Free Trade Agreement (NAFTA) menjadi United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan buruh dan produsen domestik.

Menurut Gulo dan Dwiastuti (2019), kebijakan perdagangan era Trump mencerminkan sebuah pendekatan ekonomi nasionalis dengan fokus utama pada proteksi terhadap industri dalam negeri serta pengurangan defisit perdagangan dengan negara mitra, terutama Tiongkok. Hal ini tampak jelas melalui penerapan tarif impor tinggi terhadap baja dan aluminium, serta peluncuran perang dagang dengan Tiongkok pada tahun 2018. Kebijakan tarif ini dijustifikasi melalui adanya argumen bahwa praktik perdagangan mitra dagang dianggap tidak adil dan merugikan ekonomi domestik. Pendekatan tersebut sejalan dengan kecenderungan populisme ekonomi yang mengedepankan kemandirian nasional dan kedaulatan ekonomi (Gulo & Dwiastuti, 2019).

Sementara itu, Kleszczyńska (2021) menunjukkan bahwa kebijakan Trump terhadap WTO memperlihatkan adanya perubahan sikap yang drastis dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan ini menolak untuk menunjuk anggota baru badan banding WTO (Appellate Body), sehingga melemahkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Langkah tersebut mencerminkan adanya penurunan komitmen Amerika Serikat terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan dan memperlihatkan preferensi terhadap pendekatan unilateral dan transaksional. Menurut Kleszczyńska, sikap ini secara fundamental telah melemahkan kemungkinan berfungsinya WTO secara efektif di masa depan.

Dari perspektif makro, orientasi kebijakan Trump menunjukkan tiga ciri utama, yaitu peningkatan proteksionisme dengan tarif sebagai instrumen politik ekonomi, penurunan

dukungan terhadap lembaga multilateral seperti WTO dan TPP, dan fokus pada keuntungan jangka pendek domestik, terutama dalam sektor industri dan lapangan kerja. Data dari U.S. Census Bureau menunjukkan bahwa defisit perdagangan barang AS memang sempat menurun pada 2019 sebesar 1,7%, tetapi total ekspor juga mengalami kontraksi akibat respons protektif dari mitra dagang. Dengan demikian, kebijakan perdagangan era Donald Trump secara konseptual dan empiris dapat dikategorikan sebagai bentuk kompetitif-proteksionis. Pemerintahannya menolak globalisasi yang dianggap merugikan, menekankan kemandirian ekonomi nasional, serta mengedepankan strategi negosiasi bilateral berbasis kepentingan pragmatis. Pergeseran ini menandai perubahan mendasar dalam orientasi perdagangan luar negeri AS dari tatanan liberal-kooperatif menuju sistem yang lebih berorientasi pada kompetisi dan proteksi domestik.

Analisis Komparatif Kebijakan Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump

Kebijakan Amerika Serikat dalam bidang perdagangan mengalami perubahan yang cukup signifikan antara masa pemerintahan Barack Obama (2009-2017) dan Donald Trump (2017-2021). Kebijakan perdagangan pada era Obama didasarkan pada prinsip liberalisme ekonomi serta multilateralisme. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemerintahan Obama yang berupaya memperkuat sistem perdagangan global melalui kerja sama dengan organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO), serta melakukan perjanjian multilateral seperti Trans-Pacific Partnership (TPP). Pendekatan perdagangan yang dilakukan pada era Obama mencerminkan keyakinan bahwa kerja sama antarnegara dan keterbukaan pasar dapat menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global yang lebih saling menguntungkan.

Berbeda dengan era Barack Obama, di masa pemerintahan Trump terdapat perubahan orientasi yang tajam menuju nasionalisme ekonomi dan proteksionisme. Trump dengan slogan “America First” memandang perjanjian multilateral sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Trump menarik keluar Amerika Serikat dari TPP, menetapkan tarif impor yang tinggi terhadap Tiongkok dan Uni Eropa, serta melakukan negosiasi ulang North American Free Trade Agreement (NAFTA) menjadi United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan dan melindungi industri domestik, namun kebijakan tersebut juga memicu ketegangan dagang global (Owoye & Onafowora, 2021).

Tabel 1. Komparasi Kebijakan Perdagangan Amerika Serikat

Aspek	Obama (2009–2017)	Trump (2017–2021)
Orientasi	Liberal-kooperatif, multilateral	Kompetitif-proteksionis, unilateral
Instrumen utama	TPP, WTO, FTA bilateral selektif	Tarif tinggi, USMCA, penarikan TPP

Dampak global	Penguatan sistem berbasis aturan	Ketegangan dagang & fragmentasi
---------------	----------------------------------	---------------------------------

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Instrumen kebijakan bukan satu-satunya perbedaan mendasar yang terdapat antara Presiden Barack Obama dan Donald Trump. Paradigma dasar terkait peran Amerika Serikat terhadap sistem ekonomi global juga berbeda. Obama menganggap Amerika Serikat sebagai pemimpin global yang mengharuskan menjaga keterbukaan sistem perdagangan internasional, sedangkan Trump menganggap Amerika Serikat sebagai aktor yang kompetitif dan harus mementingkan serta memaksimalkan kepentingan nasional, walaupun mengorbankan tatanan multilateral. Pergeseran pendekatan kebijakan ini juga ikut dipengaruhi oleh tekanan domestik, seperti penurunan kepercayaan terhadap globalisasi, meningkatnya ketimpangan ekonomi, serta kebangkitan populisme ekonomi di kalangan pekerja manufaktur (Cirzan, 2022; Khosravi & Emami, 2022).

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama dan Trump menggambarkan dua wajah berbeda dari politik ekonomi Amerika. Jika Obama berfokus pada ekspansi dan integrasi global, maka Trump berfokus pada repatriasi ekonomi dan proteksi pasar dalam negeri. Perubahan ini menunjukkan transisi ideologis dari keyakinan terhadap keterbukaan pasar menuju skeptisisme terhadap globalisasi, yang berimplikasi langsung terhadap hubungan dagang AS dengan Tiongkok, Uni Eropa, dan mitra-mitra strategis lainnya (Scherrer, 2022).

Faktor-faktor yang Mendasari Perubahan Kebijakan Amerika Serikat di Bidang Perdagangan

Perubahan orientasi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dari masa Barack Obama ke masa Donald Trump tidak hanya mencerminkan perbedaan gaya kepemimpinan, tetapi juga perubahan struktur ekonomi, politik domestik, dan dinamika global. Terdapat tiga kategori faktor utama yang dapat mendorong pergeseran kebijakan.

Dalam ekonomi, kemunduran pada sektor manufaktur dan meningkatnya defisit perdagangan menjadi tekanan yang kuat bagi kebijakan perdagangan luar negeri AS. Setelah krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008, ketimpangan ekonomi tetap terjadi dan meluas serta banyak pekerja kelas menengah yang berada di bidang industri merasa tertinggal sebagai dampak dari globalisasi, padahal saat itu pemulihan ekonomi di masa Obama sedang berlangsung. Hal tersebut membuat warga Amerika Serikat percaya bahwa perjanjian perdagangan bebas akan mengurangi lapangan kerja domestik. Ketidakpuasan tersebut menjadi modal politik bagi Trump untuk mempromosikan agenda “America First” yang menolak globalisasi dan menekankan proteksi industri dalam negeri.

Pada sisi politik dan ideologi, perbedaan paradigma antara Partai Republik dan Partai Demokrat semakin memperjelas arah kebijakan. Pemerintahan Obama berpegang pada prinsip liberal internasionalisme, yang merupakan keyakinan bahwa keterlibatan dalam sistem perdagangan global akan membantu Amerika Serikat untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia dan dapat menumbuhkan stabilitas internasional. Berbeda dengan Trump, pemerintahannya justru lebih memprioritaskan keuntungan domestik, hal tersebut dapat terlihat melalui kebijakan unilateralisme dan renegotiasi perjanjian perdagangan. Trump berulang kali menegaskan bahwa perjanjian multilateral seperti TPP dan NAFTA dapat “merugikan” pekerja AS, sehingga ia lebih memilih strategi negosiasi bilateral agar AS memiliki posisi tawar yang lebih besar (Cirzan, 2022).

Faktor ketiga yang juga memiliki pengaruh yang cukup besar adalah perubahan lingkungan global, terutama dengan meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok dan tantangan terhadap hegemoni ekonomi AS. Selama masa Obama, Tiongkok telah menjadi pesaing utama dalam perdagangan internasional, namun pendekatannya masih bersifat engagement, yakni melibatkan Tiongkok dalam sistem perdagangan global melalui forum multilateral seperti WTO dan G20. Sementara pada masa Trump, muncul persepsi bahwa keterlibatan Tiongkok tersebut justru akan semakin memperkuat posisi Tiongkok sebagai kompetitor strategis. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan perang dagang (trade war) 2018–2019, di mana Trump menerapkan tarif hingga 25% terhadap produk impor asal Tiongkok senilai lebih dari USD 250 miliar (Bown, 2020). Langkah ini merupakan upaya untuk menekan Tiongkok dan menghindari ketergantungan pada rantai pasok global. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain dan menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya pergeseran orientasi kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Jika pada masa Obama kebijakan perdagangan dilihat sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang berguna untuk membantu memperluas pengaruh global, maka pada masa Trump kebijakan tersebut diposisikan sebagai alat pertahanan ekonomi nasional. Pergeseran ini menggambarkan perubahan yang mendalam dalam cara Amerika Serikat memandang perannya di dunia.

KESIMPULAN

Beralihnya fokus kebijakan perdagangan AS dari pemerintahan Barack Obama ke pemerintahan Donald Trump merepresentasikan pergeseran paradigma besar dalam kebijakan ekonomi internasional AS. Selama era Obama, kebijakan perdagangan didasarkan pada pendekatan liberal-kooperatif yang menitikberatkan pada keterlibatan dalam sistem multilateral, perluasan pasar global, dan diplomasi ekonomi sebagai alat untuk memperkuat posisi Amerika Serikat dalam tatanan internasional. Sebaliknya, era Trump menandai munculnya paradigma kompetitif-proteksionis, di mana kepentingan nasional dan kedaulatan

ekonomi menjadi prioritas utama, disertai dengan kecenderungan menuju unilateralisme dan penolakan terhadap mekanisme perdagangan bebas yang dipandang merugikan pekerja domestik.

Analisis komparatif memperlihatkan bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak semata-mata muncul akibat preferensi politik kedua presiden, tetapi juga merupakan tanggapan terhadap perubahan struktural dalam ekonomi global dan tekanan politik domestik. Faktor-faktor seperti meningkatnya ketimpangan ekonomi, stagnasi di sektor manufaktur, dan munculnya populisme ekonomi menjadi latar belakang proteksionisme pada era Trump. Di sisi lain, meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok dan melemahnya efektivitas sistem perdagangan multilateral telah mendukung persepsi bahwa globalisasi telah beralih dari menguntungkan Amerika Serikat menjadi mengancam daya saing nasional.

Dampak dari pergeseran orientasi ini sangat luas. Secara domestik, kebijakan proteksionis mungkin telah memberikan dorongan politik dan ekonomi jangka pendek, tetapi secara struktural, kebijakan tersebut meningkatkan biaya produksi dan mengurangi efisiensi pasar. Pada tingkat global, kebijakan “America First” justru merusak kredibilitas Amerika Serikat sebagai promotor perdagangan bebas dan mengurangi pengaruhnya dalam arsitektur ekonomi global. Ketika Obama menempatkan AS sebagai pemimpin global yang berorientasi pada kerja sama, Trump mentransformasikannya ke arah kekuatan ekonomi yang lebih tertutup dan konfrontatif. Transformasi kebijakan perdagangan ini dapat dipahami sebagai refleksi dari perubahan ideologi ekonomi dan politik Amerika Serikat, dari liberalisme internasional menuju nasionalisme ekonomi. Perubahan ini menandai fase baru dalam dinamika tatanan global di mana peran hegemonik Amerika semakin dipertanyakan. Dalam konteks yang lebih luas, studi ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika domestik dan persepsi terhadap distribusi keuntungan globalisasi.

REFERENSI

- Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2019). The impact of the 2018 trade war on U.S. prices and welfare. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 187–210. <https://doi.org/10.1257/jep.33.4.187>
- Ashbee, E., & Waddan, A. (2010). The Obama administration and United States trade policy. *The Political Quarterly*, 81(2), 253–262. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2010.02123.x>
- Bown, C. P. (2020). *The 2018–2019 trade war and U.S. tariffs*. Peterson Institute for International Economics Working Paper.
- Cirzan, A. M. (2022). *Trading presidential rhetoric: The relationship between shifting rhetoric and policy in trade from Obama to Trump* (Master’s thesis). Northern Arizona University.
- Gulo, T. R., & Dwiastuti, I. (2019). The rising US trade protectionism under Donald Trump and its implication on China’s artificial intelligence advancement. *AEGIS: Journal of International Relations*, 4(1), 45–62.

- Khosravi, S., & Emami, Z. (2022). A comparative study on the Obama and Trump administrations' foreign policy approaches. *International Journal of Political Science*, 12(2), 51–65.
- Kleszczyńska, I. (2021). The United States' policy towards the World Trade Organization during the presidency of Donald Trump. *Ad Americam: Journal of American Studies*, 22(2), 25–36. <https://doi.org/10.12797/AdAmericam.22.2021.02.02>
- Owoye, O., & Onafowora, O. A. (2021). Comparative analysis of tariffs-restricted trade wars between the United States and China under the recent past four presidents: Did they achieve their objectives? *Journal of Economics, Management and Trade*, 27(9), 9–21. <https://doi.org/10.9734/jemt/2021/v27i930365>
- Scherrer, C. (2022). Biden's foreign economic policy: Crossbreed of Obama and Trump? *International Review of Public Policy*, 4(1), 129–138. <https://doi.org/10.4000/irpp.3291>
- United States Trade Representative (USTR). (2015). *The President's 2015 trade policy agenda*. <https://ustr.gov>
- United States Trade Representative (USTR). (2015). *Fact sheet: The Obama administration's unprecedented trade enforcement record*. <https://ustr.gov>